



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI BUDHIANTO
2. Jabatan : DIREKTUR PELAKSANAAN ANGGARAN
3. NHK : 101216

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 111 m²/75 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 185 m²/150 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 224.500.000

1. MOTOR, HONDA BLADE SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
3. MOBIL, NISSAN ALL NEW LIVINA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 90.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 887.297.615

F. HARTA LAINNYA Rp. 950.000.000

Sub Total Rp. 4.601.797.615

III. HUTANG Rp. 407.393.847

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.194.403.768

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.